

## KATA PENGANTAR

Bencana tanah longsor merupakan fenomena alam, yang terjadi karena dipicu oleh proses alamiah dan aktivitas manusia yang tidak terkendali dalam mengeksploitasi alam. Proses alamiah sangat tergantung pada kondisi curah hujan, tata air tanah (geohidrologi), struktur geologi, jenis batuan, geomorfologi, dan topografi lahan. Sedangkan aktivitas manusia terkait dengan perilaku dalam mengeksploitasi alam untuk kesejahteraan manusia, sehingga akan cenderung merusak lingkungan, apabila dilakukan dengan intensitas tinggi dan kurang terkendali.

Pemanfaatan ruang sebagai salah satu bentuk aktivitas manusia, dalam wujud penguasaan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya. Dalam Keppres No.32 Tahun 1990 kawasan rawan bencana longsor telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun dalam prakteknya telah terjadi pelanggaran dalam pemanfaatannya, sehingga diperlukan upaya pengendalian terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan tersebut. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana longsor, dilakukan dengan mencermati konsistensi, baik kesesuaian dan keselarasan antara rencana tata ruang dengan pemanfaatan ruang.

Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Longsor, merupakan produk yang diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan pegangan bagi stakeholders pembangunan di wilayah provinsi/kabupaten/kota, dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Dikaitkan dengan kebijakan yang ada, secara umum pedoman ini merupakan penjabaran dari UU No.24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang, serta petunjuk teknis terhadap pengelolaan kawasan lindung dan budidaya, yang tertuang dalam PP No.47 tahun 1997 Tentang RTRWN.

Kedudukan pedoman adalah sebagai bagian dan pelengkap dari Kepmen KIMPRASWIL No.327/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Penyusunan dan Peninjauan Kembali RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dan bersama-sama dengan pedoman lain dapat digunakan sebagai petunjuk operasional awal bagi pemerintah daerah, dalam pengendalian pemanfaatan ruang di wilayahnya. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih operasional dan tepat sasaran, pedoman ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dan dikembangkan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Demikian pedoman ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat dan dikembangkan lebih lanjut.

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah  
Direktorat Jenderal Penataan Ruang

**Junius Hutabarat**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1-1
1.2 Tujuan dan Sasaran Pedoman .....	1-1
1.3 Manfaat Pedoman .....	1-2
1.4 Sistematika Pedoman .....	1-2
<b>BAB 2 KETENTUAN UMUM</b>	
2.1 Pengertian .....	2-1
2.2 Kedudukan Pedoman .....	2-4
2.3 Dasar Hukum .....	2-4
<b>BAB 3 KONSEP PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR</b>	
3.1 Konsep Pengendalian .....	3-1
3.2 Pembagian Ruang Yang Mempunyai Potensi Rawan Bencana Longsor Dan Banjir .....	3-1
3.3 Kebijakan Pokok Pemanfaatan Ruang .....	3-2
3.4 Permasalahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor .....	3-4
3.5 Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor .....	3-4
<b>BAB 4 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR</b>	
4.1 Karakteristik Kawasan Rawan Bencana Longsor .....	4-1
4.2 Klasifikasi dan Faktor Penyebab Bencana Longsor .....	4-2
4.3 Tipologi Kawasan .....	4-2
4.4 Tingkat Kerawanan Kawasan Rawan Bencana Longsor .....	4-5
4.5 Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor Menurut Tipologi .....	4-6
4.5.1 Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor Dengan Tingkat Kerawanan Tinggi .....	4-7
4.5.2 Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor Dengan Tingkat Kerawanan Menengah .....	4-17
4.5.3 Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor Dengan Tingkat Kerawanan Rendah .....	4-18
4.6 Mekanisme Perijinan .....	4-18
4.6.1 Umum .....	4-18
4.6.2 Berdasarkan Tipologi .....	4-24

4.7	Kelembagaan dan Peran Masyarakat .....	4-32
4.7.1	Pemerintah .....	4-32
4.7.2	Peran Serta Masyarakat .....	4-33
4.8	Rekayasa Teknik .....	4-35

**LAMPIRAN**

**L.1 KLASIFIKASI DAN FAKTOR PENYEBAB BENCANA LONGSOR**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kedudukan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Longsor Dalam Penataan Ruang .....	2-4
Gambar 3.1	Pembagian Ruang Kawasan Potensi Rawan Bencana Banjir dan Longsor .....	3-2
Gambar 4.1	Prosedur Ijin Lokasi (PMNA/KBPN No.2 Tahun 1999) .....	4-22
Gambar 4.2	Diagram Prosedur Pengurusan IMB di Kabupaten/Kota .....	4-23
Gambar L.1-1	Gerakan Tanah Jenis Runtuhan .....	L.1-9
Gambar L.1-2	Gerakan Tanah Jenis Jungkiran .....	L.1-9
Gambar L.1-3	Gerakan Tanah Jenis Longsoran Rotasi .....	L.1-10
Gambar L.1-4	Gerakan Tanah Jenis Longsoran Translasi .....	L.1-10
Gambar L.1-5	Gerakan Tanah Jenis Gerakan Lateral .....	L.1-11
Gambar L.1-6	Gerakan Lateral Majemuk .....	L.1-11
Gambar L.1-7	Gerakan Tanah Jenis Aliran .....	L.1-12
Gambar L.1-8	Gerakan Tanah Jenis Majemuk .....	L.1-14
Gambar L.1-9	Gangguan Kemantapan Lereng Karena Tegangan Horisontal Menurun .....	L.1-14
Gamb. L.1-10	Perubahan Tegangan Sebelum dan Sesudah Pembebanan .....	L.1-15
Gamb. L.1-11	Gangguan Kemantapan Lereng Karena Tegangan Vertikal Meningkatkan .....	L.1-15
Gamb. L.1-12	Retakan Susut Yang Terisi Air, Meningkatkan Tegangan Geser .....	L.1-15
Gamb. L.1-13	Gangguan Kemantapan Lereng Karena Tegangan Siklik .....	L.1-16
Gamb. L.1-14	Perubahan Kekuatan Geser Tanah Sepanjang Bidang Longsoran .....	L.1-17
Gamb. L.1-15	Perubahan Kekuatan Geser Tanah Pada Waktu Hujan Akibat Peningkatan Muka Air Tanah dan Penjenuhan Perlapisan Tanah .....	L.1-17
Gamb. L.1-16	Peningkatan Tekanan Air Pori pada Bidang Longsoran Karena Perubahan Muka Air Tanah Bebas Waktu Pengisian Air Waduk .....	L.1-18

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1	Arahan Pemanfaatan Ruang .....	4-6
Tabel 4.2	Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor (Tipologi A) .....	4-8
Tabel 4.3	Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor (Tipologi B) .....	4-11
Tabel 4.4	Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor (Tipologi C) .....	4-14
Tabel 4.5	Mekanisme Perijinan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Longsor (Tipologi A) .....	4-25
Tabel 4.6	Mekanisme Perijinan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Longsor (Tipologi B) .....	4-27
Tabel 4.7	Mekanisme Perijinan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Longsor (Tipologi C) .....	4-29
Tabel 4.8	Faktor Keamanan Minimum Kemantapan Lereng (KepMen PU No.378/KPTS/1987) .....	4-36
Tabel 4.9	Persyaratan Kemiringan Lereng Untuk Berbagai Peruntukan Budidaya (Marsh, W.M., 1991) .....	4-38